PEMERINTAH
KABUPATEN
NGANJUK

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



KECAMATAN SAWAHAN

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR CAMAT SAWAHAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

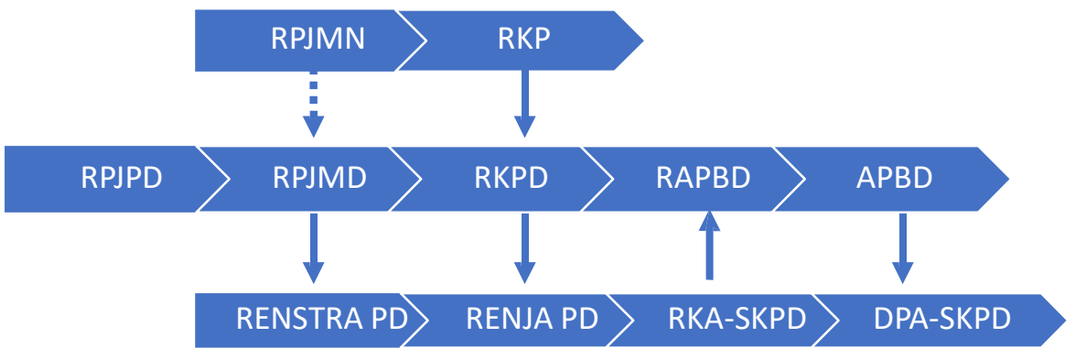
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor IV Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Nganjuk.
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Nganjuk No I tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layah Anak.
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 3 Tahun 2020 tentang Pengaruskeutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (dua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			*Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota*	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah / Nilai SAKIP Kecamatan*	2.880.124.071	2.030.150.990	2.826.499.663	2.088.515.933	73,89%	2.496.071.550	6.614.738.473	230%
7	01	01	2.01		*Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD*	1.200.000	200.000	1.020.800	820.900	80,41%	1.200.000	2.220.900	185%
7	01	01	2.01	01	Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan)	Jumlah dokumen perencanaan PD	200.000	0	171.150	171.150	100%	200.000	371.150	186%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	200.000	0	149.950	149.950	100%	200.000	349.950	175%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	200.000	0	149.950	149.950	100%	200.000	349.950	175%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DKA SKPD	Jumlah dokumen DKA SKPD	200.000	0	199.900	199.900	100%	200.000	399.900	200%

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	200.000	0	149.950	149.950	100%	200.000	349.950	175%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar OPD yang dilaksanakan	200.000	200.000	199.900	0	0%	200.000	400.000	200%
7	01	01	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Keuangan SKPD*	2.596.621.521	1.912.584.123	2.491.384.000	1.823.670.841	73,19%	2.212.569.000	5.948.823.964	229%
7	01	01	2.02	01	Gaji dan Tunjangan ASN(kecamatan Sawahan)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.595.221.521	1.912.284.123	2.490.084.000	1.822.730.841	73,19%	2.211.169.000	5.946.183.964	229%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	200.000	1.200.000	840.000	70%	1.200.000	2.240.000	187%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	200.000	100.000	100.000	100.000	100%	200.000	400.000	200%
7	01	01	2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai*	15.596.400	0	12.556.400	9.939.200	79,15%	15.596.400	25.535.600	164%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	9.596.400	0	12.556.400	9.939.200	79,15%	9.596.400	19.535.600	204%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur perencana dan peneliti yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	6.000.000	0	0	0	0%	6.000.000	6.000.000	100%
7	01	01	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daearah*	*Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD*	68.225.750	29.272.340	71.636.500	43.438.350	60,63%	68.225.750	140.936.440	207%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	2.500.000	890.900	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	5.890.900	236%
7	01	01	2.06	03	Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3.370.050	1.512.800	3.370.050	2.698.650	80,07%	3.370.050	7.581.500	225%

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	45.635.700	22.926.300	44.666.450	31.684.200	70,93%	45.635.700	100.246.200	220%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3.500.000	2.142.340	3.340.000	2.325.500	69,92%	3.500.000	7.967.840	228%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	3.000.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	100%	3.000.000	7.800.000	260%
7	01	01	2.06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9.020.000	0	14.760.000	1.230.000	8,33%	9.020.000	10.250.000	114%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	1.200.000	0	0	0	0%	1.200.000	1.200.000	100%
7	01	01	2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah*	26.350.000	0	49.494.900	49.450.000	99,9%	26.350.000	75.800.000	288%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	9.000.000	0	49.494.900	49.450.000	99,9%	9.000.000	58.450.000	649%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	17.350.000	0	0	0	0%	17.350.000	17.350.000	100%
7	01	01	2.08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*	34.200.000	19.175.727	34.482.000	17.998.692	52,19%	34.200.000	71.374.419	209%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	600.000	0	0	0	0%	600.000	600.000	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	33.600.000	19.175.727	34.8420.000	17.998.692	52,19%	33.600.000	70.774.419	211%
7	01	01	2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah*	137.930.400	68.918.800	165.925.063	143.197.950	86,3%	137.930.400	350.047.150	254%

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	40.003.200	23.368.800	35.623.113	28.455.000	79,89%	40.003.200	91.827.000	230%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	3.502.000	0	2.500.000	0	0%	3.502.000	3.502.000	100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	22.650.000	4.750.000	53.910.400	46.295.400	85,87%	22.650.000	73.695.400	325%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	71.775.200	40.800.000	73.891.550	68.447.550	92,63%	71.775.200	181.022.750	252%
7	01	02	2		*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	*Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan*	116.735.000	73.538.000	75.702.000	28.107.000	37%	116.735.000	218.380.000	187%
7	01	02	2.01		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.*	109.805.000	72.573.000	73.772.000	27.142.000	36,79%	109.805.000	209.520.000	191%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan.	109.805.000	72.573.000	73.772.000	27.142.000	36,79%	109.805.000	209.520.000	191%
7	01	02	2.03		*Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	*Jumlah kegiatan koordinsi / sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana*	5.000.000	0	0	0	0%	5.000.000	5.000.000	100%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun	5.000.000	0	0	0	0%	5.000.000	5.000.000	100%

					dan Prasarana Pelayanan Umum									
7	01	02	2.04		*Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*	*Jumlah warga yang mendapat pelayanan*	1.930.000	965.000	1.930.000	965.000	50%	1.930.000	3.860.000	200%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan yang disusun	965.000	965.000	965.000	965.000	100%	965.000	2.895.000	300%
7	01	02	2.04	03	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	965.000	0	965.000	0	0%	965.000	965.000	100%
7	01	03			*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	*Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*	51.670.000	75.981.000	55.755.000	40.926.900	73,4%	51.670.000	168.577.900	326%
7	01	03	2.01		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*	51.670.000	75.981.000	55.755.000	40.926.900	73,4%	51.670.000	168.577.900	326%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	35.000.000	11.274.000	39.085.000	26.500.500	67,8%	35.000.000	72.774.500	208%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16.670.000	64.707.000	16.670.000	14.426.400	86,54%	16.670.000	95.803.400	575%
7	01	04	2		*PROGRAM KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM*	*Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan*	21.000.000	0	0	0	0%	21.000.000	21.000.000	100%

7	01	04	2.01		*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI*	21.000.000	0	0	0	0%	21.000.000	21.000.000	100%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	21.000.000	0	0	0	0%	21.000.000	21.000.000	100%
7	01	05			*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	*Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan*	120.067.800	15.890.000	230.048.750	180.996.200	78,67%	120.067.800	316.954.000	264%
7	01	05	2.01		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan*	120.067.800	15.890.000	230.048.750	180.996.200	78,67%	120.067.800	316.954.000	264%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	120.067.800	15.890.000	230.048.750	180.996.200	78,67%	120.067.800	316.954.000	264%
7	01	06	2		*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*	*Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	59.567.500	8.327.500	41.567.500	27.642.000	66,49%	59.567.500	95.537.000	160%
7	01	06	2.01		*Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	59.567.500	8.327.500	41.567.500	27.642.000	66,49%	59.567.500	95.537.000	160%

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	32.567.500	8.327.500	32.567.500	23.032.000	70,72%	32.567.500	63.927.000	196%
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	0	9.000.000	4.610.000	51,2%	12.000.000	16.610.000	138%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	0	0	0	0%	15.000.000	15.000.000	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	34%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang memadainya bandwith internet mempengaruhi yang koneksi internet	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah bandwith internet dengan meningkatkan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum terisinya kekosongan pejabat structural yang menangani	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengusulkan agar pejabat structural segera diisi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Belum terisinya kekosongan pejabat structural yang menangani	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengusulkan agar pejabat structural segera diisi
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum terisinya kekosongan pejabat structural yang menangani	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengusulkan agar pejabat structural segera diisi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum terisinya kekosongan pejabat structural yang menangani	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengusulkan agar pejabat structural segera diisi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum terisinya kekosongan pejabat structural yang menangani	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengusulkan agar pejabat structural segera diisi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	100%		100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%
2.	Persentase koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	100%		80%	86%	90%	95%	90%	95%	95%	95%
3.	Persentase desa/ kelurahan yang meyusun buku profil desa / kelurahan	100%		80%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	86%
4.	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%		90%	95%	95%	95%	96%	95%	95%	100%
5.	Persentase peserta musrenbang kecamatan yang hadir	100%		90%	98%	100%	97%	80%	95%	95%	98%
6.	Presentase pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)	100%		100%	100%	100%	100%	85%	97%	97%	92%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Thn. 2020	Thn. 2021	Thn. 2022	Thn. 2023	Thn. 2020	Thn. 2021	Thn. 2022	Thn. 2023
1.	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	96%	98%	100%	100%
2.	Presentase pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)	100%	100%	100%	100%	94%	85%	97%	92%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan **Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)**

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah **"**TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI **MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Sawahan memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 serta sasaran strategis daerah Kecamatan Sawahan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka Kecamatan Sawahan sebagai pusat pengembangan kecamatan,
2. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Sawahan termasuk jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Sawahan sebagai penghubung dengan jalan Kabupaten Kecamatan Berbek - Sawahan yang akan dikembangkan menjadi Jalan Propinsi dalam lingkup pengembangan selingkar wilis
3. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15),

4. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana Kebakaran Hutan dan Tanah Longsor dimana kecamatan Sawahan Berada dilereng Gunung WIlis.
5. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat.
6. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan.
7. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.5
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2021

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1)									
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	%	N/A							Bappeda
2.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Tujuan 9)									
	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan									
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	90	100		100				Bappeda
3.	Tujuan SDGs 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16)									
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Nilai	61,24	65		70				Setda/ Bappeda/ Inspektorat
4.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17)									
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama									

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah MoU								Setda/ Bappeda/ BPKAD

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2021

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Perangkat Daerah) memberikan kontibusi terhadap tujuan ke-

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

a. Kecamatan Sawahan jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Sawahan.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sawahan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (Good Governance)
f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakanpenghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sawahan

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sawahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Sawahan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Sawahan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawahan;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sawahan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sawahan;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Sawahan. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa; Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan. Seperti PKH/BLT dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.5 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

1. P*emanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2. *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu

pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4 *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5 *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan* Desa *yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

2.3.6 Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 2.6
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"**Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi**"**.

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor Kecamatan Sawahan	Nilai SAKIP Kecamatan	80	Rp2.880.124.071	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor Kecamatan Sawahan	Nilai SAKIP Kecamatan	80	Rp2.918.410.808	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp1.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp1.200.000	
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Kec. Sawahan)	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp200.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Kec. Sawahan)	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp200.000	
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	
6	Koordinasi dan penyusunan dokumen DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Rp200.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Rp200.000	

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7	Kordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	Kordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp200.000	
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp2.596.621.521	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp2.596.621.508	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp2.595.221.521	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp2.595.221.508	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1.200.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp200.000	
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Rp15.596.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Rp15.701.100	

			Kepegawaian Perangkat Daerah					Kepegawaian Perangkat Daerah			
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Rp9.596.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Rp9.701.100	
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	Rp6.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	Rp6.000.000	
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Rp68.225.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Rp72.640.600	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	Rp2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	Rp2.500.000	
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8 Paket	Rp3.370.050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8 Paket	Rp3.367.200	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	Rp45.635.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	Rp50.073.700	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	Rp3.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	Rp3.499.700	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	Rp3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	Rp3.000.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp9.020.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp9.000.000	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	Rp1.200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	Rp1.200.000	

24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	6 Unit	Rp26.350.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	6 Unit	Rp69.631.100	
25	Pengadaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	Rp9.000.000	Pengadaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	Rp8.815.400	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	Rp17.350.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	Rp60.815.700	
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp34.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp34.200.000	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Rp600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Rp600.000	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan	Rp33.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan	Rp33.600.000	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	12 Bulan	Rp137.930.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	12 Bulan	Rp128.416.500	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp40.003.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp39.968.250	
32	Pemeliharaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	Rp3.502.000	Pemeliharaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	Rp6.477.750	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	6 Unit	Rp22.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	6 Unit	Rp7.625.000	

34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp71.775.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp74.345.500	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	100%	Rp116.735.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	100%	Rp116.678.000	
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	Rp109.805.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	Rp109.748.000	
37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	Rp109.805.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	Rp109.748.000	
38	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 kegiatan	Rp5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 kegiatan	Rp5.000.000	
39	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	Rp5.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	Rp5.000.000	
40	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 kegiatan	Rp1.930.000	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 kegiatan	Rp1.930.000	

	Dilimpahkan Kepada Camat		Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			Dilimpahkan Kepada Camat		Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			
41	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp965.000	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp965.000	
42	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp965.000	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp965.000	
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	15 kegiatan	Rp51.670.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	15 kegiatan	Rp51.670.000	
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	15 kegiatan	Rp51.670.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	15 kegiatan	Rp51.670.000	
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	Rp35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	Rp35.000.000	
46	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	Rp16.670.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	Rp16.670.000	
47	PROGRAM KETENTRAMAN KETERTIBAN, DAN	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Permasalahan Ketentraman Dan	100%	Rp21.000.000	PROGRAM KETENTRAMAN KETERTIBAN, DAN	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Permasalahan Ketentraman Dan	100%	Rp20.999.600	

	PEMERINTAHAN UMUM		Ketertiban Umum Yang Ditangani			PEMERINTAHAN UMUM		Ketertiban Umum Yang Ditangani			
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	Rp21.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	Rp20.999.600	
49	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	3 laporan	Rp21.000.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	3 laporan	Rp20.999.600	
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	100%	Rp120.067.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	100%	Rp198.392.500	
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	Rp120.067.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	Rp198.392.500	
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	440 orang	Rp120.067.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	440 orang	Rp198.392.500	

	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang	100%	Rp59.567.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang	100%	Rp59.567.200	
54	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	9 Desa/kelurahan	Rp59.567.500	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	9 Desa/kelurahan	Rp59.567.200	
55	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp32.567.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp32.567.500	
56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3 Dokumem	Rp12.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3 Dokumem	Rp11.999.700	
57	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	Rp15.000.000	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	Rp15.000.000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

2.3.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	81
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	81
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu **"Pemulihan Ekonomi** Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang **Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;

6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2024-2029, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2 Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social*

distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU RENJA PD TAHUN 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Sawahan

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	81	Rp 3.146.326.008
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	Rp 219.392.100

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	80	Rp 2.918.410.808
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp 1.272.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 212.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 212.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 212.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 212.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 212.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp 212.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 2.596.621.508
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp 2.595.221.508
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 200.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 15.7 01.100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Rp 9.701.100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	Rp 6.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Rp 72.640.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	Rp 2.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8 Paket	Rp 3.367.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	Rp 50.073.700
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	Rp 3.499.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 9.000.000

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	Rp 1.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	6 Unit	Rp 69.631.100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	Rp 8.815.400
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	Rp 60.815.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 34.200.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Rp 600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan	Rp 33.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	12 Bulan	Rp 128.416.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp 39.968.250
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	Rp 6.477.750
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	6 Unit	Rp 7.625.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 74.345.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	100%	Rp 116.678.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	Rp 109.748.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	Rp 109.748.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 kegiatan	Rp 5.000.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	Rp 5.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2 kegiatan	Rp 1.930.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 965.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp 965.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	15 kegiatan	Rp 51.670.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	15 kegiatan	Rp 51.670.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	Rp 35.000.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	Rp 16.670.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	100%	Rp 20.999.600
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	Rp 20.999.600
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	3 laporan	Rp 20.999.600
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	100%	Rp 198.392.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	Rp 198.392.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	440 orang	Rp 198.392.500
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang	100%	Rp 59.567.200
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	9 Desa/kelurahan	Rp 59.567.200
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka	8 dokumen	Rp 32.567.500

		Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3 Dokumem	Rp 11.999.700
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	Rp 15.000.000

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	NIHIL					

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

Sri Handoko Taruna, S.STP, M.Si